Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan

Mempromosikan kemajuan di tingkat kabupaten menuju produksi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia

BERGERAK MENUJU KELAPA SAWIT LEGAL DAN BEBAS DEFORESTASI

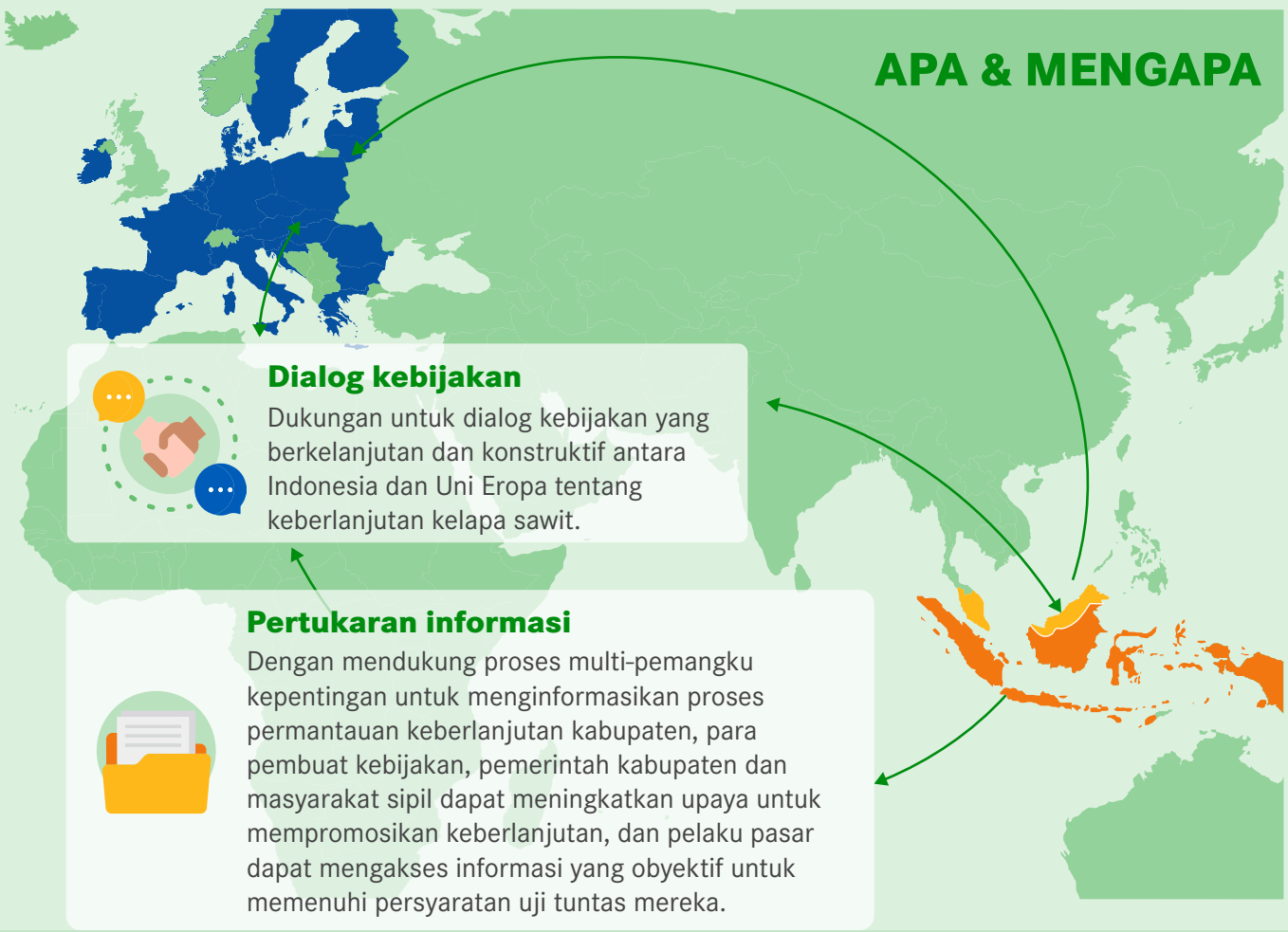

Dialog kebijakan

Dukungan untuk dialog kebijakan yang berkelanjutan dan konstruktif antara Indonesia dan Uni Eropa tentang keberlanjutan kelapa sawit.

Pertukaran informasi

Dengan mendukung proses multi-pemangku kepentingan untuk menginformasikan proses permantauan keberlanjutan kabupaten, para pembuat kebijakan, pemerintah kabupaten dan masyarakat sipil dapat meningkatkan upaya untuk mempromosikan keberlanjutan, dan pelaku pasar dapat mengakses informasi yang obyektif untuk memenuhi persyaratan uji tuntas mereka.

PENDEKATAN YURISDIKSI

Keberlanjutan kabupaten dilacak melalui serangkaian Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) yang disesuaikan yang dapat memberikan informasi untuk proses uji tuntas seperti yang dipersyaratkan oleh pasar global.

Kabupaten dengan risiko deforestasi rendah dan tingkat keberlanjutan yang tinggi dapat menunjukkan kemajuan dengan lebih baik, sementara transisi menuju keberlanjutan akan diberi insentif.

- **Inklusi petani kecil** dalam rantai pasokan untuk kelapa sawit berlelanjutan sangat penting untuk meningkatkan mata pencaharian dan memenuhi tujuan keberlanjutan.
- **Petani kecil membutuhkan dukungan** dalam mengatasi tantangan teknis, keuangan, dan terkait dengan pengetahuan. Masalah dengan kepemilikan lahab dan keterlacakan juga perlu ditangani.

MANFAAT

Petani kecil

Meningkatkan pendapatan melalui akses ke rantai pasokan untuk kelapa sawit berkelanjutan dan dukungan yang lebih tepat sasaran.

Lingkungan

Kebijakan dan pasar bekerja sama dalam menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan komoditas dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Perdagangan

Operator dan pedagang dapat mengakses informasi tentang kinerja keberlanjutan untuk menginformasikan proses uji tuntas mereka dan meningkatkan perdangan kelapa sawit berkelanjutan.

Penyangkalan. Publikasi ini diproduksi dengan dukungan finansial dari Uni Eropa. Pandangan yang diungkapkan dalam dokumen ini sama sekali tidak dapat dianggap mencerminkan pendapat resmi Uni Eropa.
© European Forest Institute, 2023

KAMI

EFI

BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Funded by the European Union

Informasi lebih lanjut, kunjungi https://efi.int/partnerships/sustainable-jurisdictional-approach